

Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan, dan Biaya Barang dan Jasa terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Chindy Angrainy^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: chindyanrainy123@gmail.com

Tanggal Masuk:

06 Juni 2024

Tanggal Revisi:

04 November 2024

Tanggal Diterima:

06 Januari 2025

Keywords: *Population; Local Original Income; Financial Efficiency; Costs of Goods and Services.*

How to cite (APA 6th style)

Angrainy, C. & Deviani (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Keuangan, dan Biaya Barang dan Jasa terhadap Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (1), 77-94.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.1768>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This research aims to determine the influence of population, local original income, financial efficiency, and costs of goods and services on the financial condition of Regional Governments in Indonesia. The research population is all cities/regencies on the island of Java in 2022. This research uses secondary data with documentation techniques. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the research show that local revenue has a positive effect on the financial condition of regional governments on the island of Java. Meanwhile, population, financial efficiency and costs of goods and services have no effect on the financial condition of local governments on the island of Java. This research contributes to increasing insight and knowledge in the field of accounting, especially public sector accounting, regarding what influences influence the financial conditions of local governments.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki signifikansi yang besar dalam otonomi daerah. Meskipun banyak daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang dimilikinya, konsep otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencapai kemandirian keuangan daerah. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap efektivitas, inisiatif daerah dan kecerdikan yang digunakan dalam alokasi sumber daya keuangan. Otonomi daerah memberi pemerintah daerah potensi untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan khas daerahnya.

Ketentuan mengenai otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan ini khusus mengatur tentang pemerintahan dan otonomi daerah. Otonomi daerah berkaitan dengan pembagian hak hukum, kekuasaan yurisdiksi, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberdayakan daerah-daerah tersebut untuk mengatur dan mengelola

urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran penduduk lokalnya. Otonomi daerah mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Kenyataannya, Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu, pernah mengkritik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan TKDD. Sri Mulyani mencatat bahwa beberapa pemerintah daerah belum mampu mengelola dana tersebut secara baik. Transfer APBD yang disalurkan kepada daerah tidak selalu berhasil dalam meningkatkan pembangunan di daerah tersebut. Sesuai pemberitaan yang dimuat Koran Online Merdeka.com pada 8 Desember 2021, Sri Mulyani mengakui tingginya biaya birokrasi menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Selama tiga tahun terakhir, alokasi dana untuk pegawai dan pengadaan barang dan jasa secara konsisten mencapai rata-rata 59% dari keseluruhan anggaran daerah. Fenomena ini menyebabkan kondisi keuangan antar pemerintah daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini akan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal, sejalan dengan tujuan otonomi daerah.

UU No. 1 Tahun 2022, berkenaan dengan pengujian interaksi fiskal antara badan pemerintahan pusat dan badan pemerintahan daerah. Aturan ini menekankan pada pengertian otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi urusan-urusan kemasyarakatan. Anggaran pemerintah daerah menggunakan alokasi dana untuk menyediakan sumber keuangan bagi pelaksanaan banyak proyek dan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Distribusi sumber daya anggaran antar daerah dapat bervariasi akibat perbedaan inisiatif program dan operasional yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Inisiatif-inisiatif ini dirancang untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan spesifik dari berbagai konstituennya. Dengan demikian, kondisi keuangan tiap-tiap pemerintah daerah akan bervariasi berdasarkan prioritas dan kebijakan yang mereka pilih untuk diterapkan. Kondisi keuangan, yang juga dikenal sebagai kondisi fiskal atau kesehatan fiskal, adalah elemen yang sangat krusial dalam konteks pemerintahan. Informasi mengenai kondisi fiskal merupakan elemen yang sangat krusial dalam konteks pemerintahan. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang memadai kepada masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi daerah, dan mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin timbul (Cabaleiro Casal & Buch Gómez, 2011). Kondisi keuangan merupakan kemampuan organisasi untuk mempertahankan tingkat layanan, menahan gangguan ekonomi, dan memenuhi tuntutan pertumbuhan dan penurunan (Maher & Nollenberger, 2009).

Pentingnya pemantauan kondisi keuangan sangat relevan di tingkat daerah, karena pemerintah daerah tidak memiliki indikator nasional untuk mencatat kinerja yang berbeda-beda. Informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dapat bermanfaat dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan para manajer publik dan politisi mengenai pemberian layanan publik. Para akademisi dan praktisi telah mengkaji isu-isu ini baik ditingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan kapasitas untuk terus menyediakan layanan termasuk penggunaan sumber daya publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan defisit. Oleh karena itu, telah dinyatakan betapa pentingnya untuk menguji variabel apa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah lokal. Dengan ini, pengelola publik dan politisi dapat mengawasi dan menjaga keberlanjutan layanan publik dari waktu ke waktu. Analisis ini menggunakan model enam dimensi yang dikembangkan oleh Ritonga et al. (2012) posisi keuangan saat ini akan dianalisis. Strategi ini menggabungkan berbagai aspek solvabilitas, termasuk solvabilitas tingkat layanan,

solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka pendek, serta fleksibilitas dan otonomi keuangan. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator berbeda.

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori penawaran dan permintaan yang dikembangkan oleh Keynes. Deacon (1978), sebagaimana dijelaskan oleh Ritonga et al. (2019), menyatakan bahwa prinsip-prinsip teori permintaan dapat digunakan secara efektif dalam menganalisis pengeluaran sektor publik. Hal ini karena alokasi anggaran sektor publik dilakukan dengan cara yang mirip dengan rumah tangga, yaitu mengalokasi pendapatan untuk berbagai komoditas swasta. Hipotesis ini akan menjadi landasan penjelasan mengenai hubungan kesehatan keuangan pemerintah daerah dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al. (2019) dan berjudul "*Factor Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia*". Penelitian ini membedakannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga et al. (2019) dengan memanfaatkan data penelitian tingkat kabupaten yang dikumpulkan pada tahun 2010 secara eksklusif, dengan fokus khusus pada wilayah Jawa. Penelitian ini akan menggunakan data penelitian seluruh Kota dan Kabupaten dipulau Jawa tahun 2022. Penelitian ini menguji kembali variabel yang memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan pemda di pulau Jawa. Jumlah penduduk, pendapatan daerah, efektivitas keuangan, dan biaya produksi produk dan jasa merupakan empat faktor independen yang akan diteliti dalam penelitian ini dan akan berdampak pada kondisi keuangan.

Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan pada kondisi keuangan pemda. Penduduk, menurut Badan Pusat Statistik, terdiri atas seluruh penduduk yang telah bertempat tinggal di wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia selama sekurang-kurangnya enam bulan atau lebih, serta penduduk yang baru datang namun bermaksud menetap. Kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan untuk mengakomodasi pertumbuhan dan penurunan populasi akan terkena dampaknya (Marseno & Mulyani, 2020). Dengan bertambahnya jumlah penduduk akan menimbulkan tuntutan peningkatan dalam pengeluaran pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan memengaruhi kondisi keuangan pemda Wang et al. (2007)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada aliran pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, yang berasal dari pajak yang diatur oleh peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan ini menekankan dari mana pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan. Ketika pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjalankan tugasnya, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan desentralisasi secara efektif (Nasution, 2010). Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat akan berkurang. Tingginya prevalensi ketergantungan bantuan pemerintah pada pendapatan asli daerah (PAD) diperkirakan akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fiskal pemerintah kota. Pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu sumber utama yang digunakan untuk membiayai belanja daerah.

Efisiensi keuangan memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan baik dan memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan, kondisi keuangan akan lebih stabil dan berkelanjutan. Selain mengontrol pengeluaran, efisiensi keuangan juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Ketika efisiensi keuangan diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Masyarakat akan lebih percaya bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan baik dan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Ini dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah daerah dan memperkuat kondisi keuangan secara keseluruhan.

Harga pokok barang dan jasa berhubungan langsung dengan harga sumber daya yang digunakan dalam pembuatan barang dan penyediaan jasa oleh pemerintah kota. Penetapan upah minimum oleh pemerintah daerah mempunyai dampak besar terhadap pengeluaran keuangan yang terhubung dengan pelaksanaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah. Penyediaan produk dan jasa di suatu daerah dapat mengalami peningkatan aktivitas transaksi seiring dengan kenaikan gaji minimum pemerintah daerah. Dengan demikian, perekonomian daerah akan mengalami peningkatan pertumbuhan yang berdampak pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perbaikan kondisi fiskal pemerintah daerah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Permintaan dan Penawaran

Dua aktivitas yang menjadi dasar kegiatan ekonomi adalah penawaran dan permintaan. Deacon (1978) berpendapat bahwa teori permintaan dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana anggaran sektor publik mengalokasikan layanan yang mirip dengan cara rumah tangga mengelola pendapatan untuk komoditas swasta. Teori permintaan dan teori penawaran juga digunakan oleh Ohls dan Wales (1972) untuk menjelaskan variasi pengeluaran per kapita antar negara. Dalam kerangka lingkungan pemerintahan daerah, permintaan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah bergantung pada beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat, preferensi masyarakat, dan pendapatan per kapita komunitas. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi yang bermanfaat dengan meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu yang berdampak pada kondisi fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Penyediaan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Situasi keuangan pemerintah daerah akan memburuk akibat peningkatan belanja.

Dari sisi penawaran, pendapatan asli daerah berdampak pada barang dan jasa yang ditawarkan pemerintah daerah. Peningkatan akses masyarakat terhadap barang dan jasa akan meningkatkan solvabilitas tingkat pelayanan, sehingga akan meningkatkan kedudukan keuangan pemerintah daerah. Efisiensi keuangan yang bagus dari sisi penawaran, biaya barang dan jasa kepada masyarakat dapat ditekan, sehingga pemda akan meningkatkan pasokan barang dan jasa ke masyarakat akan lebih banyak. Akibatnya tingkat layanan kepada masyarakat akan membaik.

Karena pengaruh langsungnya terhadap penyediaan komoditas dan jasa tersebut oleh pemerintah daerah, maka gaji minimum pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sisi permintaan harga produk dan jasa. Ketika pemerintah daerah menaikkan upah minimum, permintaan terhadap produk dan jasa di daerah tersebut meningkat. Pengaruh upah minimum pemerintah daerah terhadap sisi permintaan harga barang dan jasa cukup besar karena berpengaruh langsung terhadap penawaran barang dan jasa pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah menaikkan upah minimum, permintaan terhadap produk dan jasa di daerah tersebut meningkat.

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemerintah pusat adalah pemerintah pusat yang mencakup seluruh pemerintahan daerah. Presiden, wakil presiden, dan menteri merupakan pemerintah pusat. Sedangkan pemerintahan daerah adalah kewenangan yang menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan perundang-undangan ini khusus mengatur tentang pemerintahan dan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini, pemerintah

daerah akan mengupayakan untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemda dapat mengembangkan wilayahnya sesuai dengan potensi dan karakteristik khusus daerah tersebut. Hal ini merupakan peluang yang bagus bagi pemda untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian terhadap masalah lingkungan hidup dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan yurisdiksi mereka sendiri.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada pencapaian dan sinkronisasi tugas pemerintah pusat dan daerah. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bagian dari struktur peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang Interaksi Keuangan antara Pempu dan Pemda. Satuan pemerintahan daerah berwenang mengawasi dan mengurus urusan pemerintahan masing-masing berdasarkan asas otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas.

Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian kesejahteraan fiskal dilakukan berdasarkan kerangka kondisi keuangan pemerintah daerah yang diusulkan oleh Hendrick (2004) dan The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA, 1997). CICA (1997), menurut Ritonga (2015), mengacu pada evaluasi keberlanjutan, kerentanan, dan kemampuan adaptasi keuangan pemerintah daerah dalam konteks lingkungan ekonomi dan keuangan secara keseluruhan. Keberlanjutan dan keberlanjutan finansial menunjukkan kondisi di mana pemerintah daerah dapat terus melaksanakan program mereka saat ini dan membayar utangnya tanpa memberikan beban berlebihan pada perekonomian.

Analisis ini menggali posisi keuangan melalui pemanfaatan model enam dimensi Ritonga (2015). Model ini menggabungkan berbagai dimensi solvabilitas, termasuk solvabilitas tingkat layanan, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, solvabilitas jangka pendek, serta kemandirian dan fleksibilitas finansial. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator independen.

Jumlah penduduk

Berdasarkan temuan Badan Pusat Statistik, mereka yang pernah bertempat tinggal di dalam wilayah NKRI selama minimal enam bulan tergolong penduduk, termasuk mereka yang sudah lama tinggal di sana tetapi ingin tetap tinggal di sana. Perubahan dalam populasi penduduk, baik peningkatan maupun penurunan, akan terkait dengan seberapa cepat pemda dapat menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, seperti yang oleh Marseno & Mulyani, (2020). Pertumbuhan jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran pemda dan hal ini yang akan berdampak pada kondisi keuangan pemda (Wang et al., 2007).

Hyman (1990) dalam Ritonga (2015) berpendapat bahwa jumlah penduduk berpengaruh pada pengeluaran pemda dari sisi permintaan maupun penawaran. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan fasilitas umum yang harus disediakan oleh pemda kepada masyarakat. Hal ini akan berkontribusi pada total pengeluaran pemerintah daerah. Wang *et al.*, (2007) juga berpendapat bahwa populasi yang lebih besar mungkin menuntut pengeluaran publik yang lebih besar pula yang menyebabkan kondisi keuangan memburuk, sehingga jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan pemda. Ritonga et.al., (2019) dan Casal & Gomez (2011) juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Penelitian tambahan, seperti yang dilakukan oleh Ritonga et al. (2019) memberikan bukti lebih lanjut yang mendukung anggapan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan fiskal entitas pemerintah daerah. Konsekuensinya, jika terjadi pertumbuhan penduduk maka belanja pemerintah daerah akan meningkat sehingga berdampak pada kesehatan fiskalnya. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones & Walker, (2007) menunjukkan bahwa ukuran populasi penduduk dan kepadatan penduduk berhubungan positif terhadap kesulitan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Borcharding dan Deacon (1972) dan Downing (1973) menemukan bahwa kepadatan penduduk berbanding terbalik dengan pengeluaran per kapita. Selain itu, Ladd (1992) dalam Carmeli (2009) menemukan bahwa seiring dengan peningkatan kepadatan penduduk, biaya pemerintah daerah menurun. Dengan ini, apabila jumlah penduduk meningkat sehingga pengeluaran pemerintah daerah pun ikut meningkat, yang mana ini akan berpengaruh kondisi keuangan pemda.. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat merumuskan hipotesis:

H1: Jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu bentuk penerimaan yang diperoleh suatu daerah melalui pengenaan pajak dan ketetapan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Pendapatan ini berkaitan erat dengan asal-usul sumber pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemda. Jika Pemerintah daerah mampu mengandeng sumber keuangan yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dapat menjalankan prinsip desentralisasi dengan efektif dan efisien (Nasution, 2010).

Wang et al (2007) mengidentifikasi adanya pengaruh negatif antara basis pendapatan pemda dengan kondisi keuangan pemda. Pendapatan daerah berdampak pada kesehatan fiskal pemerintah daerah, menurut penelitian Cameli (2008) mengungkapkan bahwa pemasukan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Juga pada hasil penelitian yang dilakukan (Prasasti, 2013) yang menguji PAD terhadap kinerja keuangan PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas investasi dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat berdampak positif pada kondisi keuangan pemerintah daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2022.

Efisiensi Keuangan

Efisiensi keuangan mengacu pada praktik pengelolaan keuangan yang efisien yang diterapkan oleh pemda. Ini juga mengacu pada tingkat efisiensi pemda dalam memberikan layanan barang dan jasa kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan jumlah penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat.

Perspektif ini konsisten dengan pandangan Pammer (1990) yang meyakini bahwa pengelolaan yang buruk akan mengakibatkan tekanan keuangan pada pemerintah daerah. Selain itu, temuan penelitian dari Ritonga et al. (2019) menunjukkan bahwa efisiensi keuangan pemerintah daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesehatan keuangan mereka.. Efisiensi keuangan membantu pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu atau berlebihan. Dengan menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pemantauan anggaran secara berkala, evaluasi kinerja program dan proyek, serta identifikasi potensi penghematan, pemerintah dapat mengurangi risiko

defisit anggaran dan memperbaiki kondisi keuangan. Berdasarkan penjelasan yang diberikan, hipotesis dapat dibuat dengan cara berikut:

H3: Efisiensi keuangan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2022.

Biaya Barang dan Jasa

Konsep upah minimum mengacu pada tingkat kompensasi terendah yang diwajibkan secara hukum yang diwajibkan oleh pemberi kerja untuk membayar karyawannya atas pekerjaan mereka. Pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan alokasi dan penyediaan komoditas dan jasa di wilayahnya masing-masing. Penerapan upah minimum yang lebih tinggi oleh pemerintah daerah diperkirakan akan meningkatkan aktivitas transaksi di wilayah tersebut, khususnya di bidang penawaran barang dan jasa. Dengan demikian, perekonomian daerah akan semakin membaik dan berjalan lebih efisien sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah melalui pajak dan retribusi. Secara umum, hal ini akan berdampak pada keadaan fiskal pemerintah daerah.

Menurut Ritonga et al. (2019) posisi keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh biaya produk dan layanan. Ritonga et al. (2019) menyatakan bahwa harga barang dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Beck (1982) menemukan bahwa gaji pemerintah daerah dan belanja kesejahteraan yang terlalu tinggi merupakan kontributor tekanan fiskal.

Biaya barang dan jasa mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembelian berbagai barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan serta menyediakan layanan publik. Jumlah dan pola pengeluaran ini dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan pemerintah. Harga barang dan jasa yang tinggi dapat menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa. Jika biaya tidak terkendali atau tidak proporsional terhadap pendapatan, hal ini dapat mengganggu keseimbangan anggaran dan mempengaruhi kondisi keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Biaya Barang dan Jasa berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah di pulau Jawa tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dan mengacu pada pendekatan penelitian kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di pulau Jawa yang terdiri dari 6 Provinsi yang didalamnya terdapat 119 Kabupaten dan Kota dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data adalah data laporan keuangan masing-masing Kota/kab di pulau Jawa Tahun 2022. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Pengawas Keuangan serta laporan yang diperoleh pada situs resmi <https://www.bps.go.id/>. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder.

Variabel Penelitian dan Pengukuran Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Pada variabel ini kondisi keuangan diukur dengan menggunakan model 6 dimensi yang dikembangkan oleh (Ritonga, 2015). Tabel 1 dibawah ini merupakan pengukuran kondisi keuangan pemerintah daerah yang memakai model 6 dimensi Ritonga (2015) antara lain:

Tabel 1 Pengukuran Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Dimensi	Indikator
1.	Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio A = (kas + Setara Kas + Investasi jangka panjang):Kewajiban Lancar Rasio B = (Kas + Setara Kas + Investasi Jangka Pendek + Akun Piutang): Kewajiban Lancar Rasio C = Aktiva Lancar: Kewajiban Lancar
2.	Solvabilitas Anggaran	Rasio A = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): (Total Belanja –Belanja Modal) Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Belanja Operasional Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Belanja Pegawai
3.	Solvabilitas Jangka panjang	Rasio A = Kewajiban Jangka Panjang: Total Aset Rasio B = Kewajiban Jangka Panjang: Ekuitas dan Investasi Rasio C = Ekuitas dan Investasi: Total Aset
4.	Solvabilitas tingkat layanan	Rasio A = Total Ekuitas: Jumlah Penduduk Rasio B = Total Aset: Jumlah Penduduk Rasio C = Total Belanja: Jumlah Penduduk
5.	Fleksibilitas Keuangan	Rasio A = (Total Pendapatan -Pendapatan Dana Alokasi Khusus - Belanja Pegawai): (Pembayaran Pokok Pinjaman + Belanja Bunga) Rasio B = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Belanja Pegawai): Jumlah Kewajiban Rasio C = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus – Belanja Pegawai): Kewajiban Jangka Panjang Rasio D = (Total Pendapatan - Pendapatan Dana Alokasi Khusus): Jumlah Kewajiban
6.	Kemandirian Keuangan	Rasio A = Total Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Rasio B = Total Pendapatan Asli Daerah: Total Belanja

Prosedur Penelitian

Hitung indeks kondisi keuangan pemda sebagai variabel dependen, berikut beberapa langkah-langkah yang harus dihitung antara lain :

- a) Tahap awal melibatkan penghitungan seluruh indikator yang membentuk berbagai dimensi situasi keuangan.
- b) Langkah kedua adalah mengembangkan indeks indikator, dimana indeks masing-masing indikator dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{(\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum})}{(\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum})}$$

- c) Tahap ketiga adalah menentukan indeks dimensi dengan menghitung mean aritmatika dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Dimensi} = \frac{(I_{\text{indikator-1}} + I_{\text{indikator-2}} + \dots + I_{\text{indikator-n}})}{n}$$

Keterangan :

n = jumlah indikator pembentuk dimensi.
 indeks dimensi = rata-rata indeks indikator yang menyusunnya

- d) Setelah indeks dimensi ditentukan, tahap selanjutnya melibatkan pengembangan indeks kondisi keuangan gabungan (FCI). Besaran yang dimaksud ditentukan melalui penggunaan ekspresi matematika berikut:

$$\text{FCI} = w_1 \cdot \text{DI}_1 + w_2 \cdot \text{DI}_2 + \dots + w_n \cdot \text{DI}_n$$

Keterangan :

Singkatan FCI adalah singkatan dari Indeks Kondisi Keuangan.
 Variabel "w" mewakili bobot indeks dimensi.
 Singkatan DI adalah singkatan dari indeks dimensi.
 Variabel "n" mewakili jumlah dimensi.

Indeks indikator, indeks dimensi, dan indeks komposit diperoleh dengan menormalisasi nilai variabel ke rentang antara 0 dan 1. Nilai numerik 0 mewakili nilai terendah, sedangkan nilai numerik 1 mewakili nilai indeks tertinggi, 1 berarti skor sempurna dari kondisi keuangan. Dalam menghitung indeks kondisi keuangan diasumsikan bahwa bobot masing-masing dimensi adalah sama, meskipun menurut penulis bobot masing-masing dimensi seharusnya berbeda. Ritonga dkk, (2012) memberikan pembahasan mendetail tentang cara mengembangkan indeks kondisi keuangan pemerintah daerah.

Jumlah Penduduk

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), penduduk adalah mereka yang telah bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia selama minimal enam bulan. Selain itu, kategori ini mencakup individu yang telah tinggal di Indonesia kurang dari enam bulan namun berniat untuk tinggal lebih lama. Penelitian ini menggunakan ukuran jumlah penduduk pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ada di pulau Jawa pada Tahun 2022. Dengan menggunakan ekspresi matematika berikut, penghitungan populasi dilakukan:

$$\text{Penduduk} = \frac{P1}{P} \times 100\%$$

Keterangan :

P1 = Jumlah Populasi kabupaten/kota.

P = Total populasi Penduduk.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah melalui pemungutan pajak, retribusi, dan mekanisme penghasil pendapatan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan yang sah yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan menggunakan rumus tertentu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung,

$$\text{Pendapatan daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Realisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Efisiensi Keuangan

Efisiensi keuangan mengacu pada praktik manajemen keuangan yang efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beck, 1982 dalam Ritonga *et.al.*, 2019 menemukan bahwa gaji pegawai negeri dan pengeluaran tunjangan yang sangat tinggi berkontribusi pada tekanan keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut efisiensi keuangan dapat diukur melalui penggunaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Total Pengeluaran}}{\text{Pengeluaran pegawai}}$$

Biaya Barang dan Jasa

Biaya barang dan jasa mengacu pada harga sumber daya yang relevan untuk menghasilkan barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sumber daya yang relevan terdiri dari tenaga kerja, bahan langsung, modal dan tanah. Perhitungannya dapat ditentukan dengan rumus berikut:

$$\text{Biaya barang dan jasa} = \text{Upah Minimum Regional}$$

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam analisis alat yang digunakan yaitu nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk melihat arah dan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{FCI} = \alpha + \beta_1 \text{Pop} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{EF} + \beta_4 \text{CSG} + e$$

Keterangan :

FCI	= Indeks Kondisi Keuangan pemerintah daerah
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien regresi
Pop	= Jumlah Penduduk
EF	= Efisiensi Keuangan
PAD	= pendapatan asli daerah
CSG	= Biaya Barang dan Jasa
e	= <i>Standard error</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang menggambarkan data secara umum atau generalisasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian. berikut peneliti sajikan pada tabel 1 ini,

Tabel 2 Analisis Statistic Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
Y	100	0	1	.39	.490
X1	100	0	34	4.97	7.014
X2	100	0	137	95.90	20.392
X3	100	0	6	2.34	.781
X4	100	1819835	4816921	2589135.45	926.084.654
Valid N (listwise)	100				

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dalam penelitian ini adalah 100, dimana jumlah populasi sebelumnya adalah 119. Dikarenakan data yang peneliti butuhkan dari 19 daerah tersebut tidak memnuhi syarat sebagai sampel dan juga ada data yang tidak tersedia atau belum di publikasikan.

Tabel diatas juga menjelaskan nilai minimum dari variabel Y adalah 0 dan nilai maximum adalah 1, hal ini dikarenakan peneliti menggunakan variabel dummy untuk menjelaskan variabel Y dengan nilai mean sebesar 39 dan std.deviasi 0.490. Sementara untuk variabel X1 diketahui nilai minimum adalah 0 dan nilai maximum adalah 34, dengan mean sebesar 4,97 dan std. deviasi adalah 7,014. Selanjutnya variabel X2 diketahui nilai minimum adalah 0 dengan nilai maximum adalah 137 dengan nilai mean 95,90 dan std. deviasi adalah 20,392. Nilai minimum varibel X3 adalah 0 dengan nilai maximum adalah 6 sementara nilai mean variabel X3 adalah 2,34, dengan nilai std. deviasinya adalah 0,781. Variabel selanjutnya adalah variabel X4 dimana dengan nilai minimum adaah 1.819.835 dan nilai maximum 4.816.921 sementara nilai mean variabel X4 adalah 2.589.135, 45 dengan nilai std. deviasinya adalah 926.084.654

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada penelitan ini adalah diketahui bahwa nilai sig > dari 0,05 yaitu nilai sig sebesar 0,069, berdasarkan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bawah data dalam penelitian terdistribusi normal, sehingga uji selanjutnya bisa di lakukan. Untuk lebih jelasnya berikut peneliti sajikan hasil uji ini dengan SPSS pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 3 Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parametersa	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.48833796
Most Extreme Differences	Absolute	.332
	Positive	.332

	Negative	-256
Test Statistic		.332
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas pada masing-masing variabel penelitian menunjukkan nilai VIF pada variabel X1 adalah 1,170, yang artinya adalah nilainya lebih kecil dari 10, berdasarkan dasar pengambilan keputusan terhadap uji multikolinieritas artinya dalam data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadinya korelasi antara variabel. Begitu juga untuk variabel X2, X3 dan X4. Hasilnya juga menunjukkan masing-masing nilai kecil dari 10 sehingga Model regresi dapat dikatakan baik dengan tidak terjadinya korelasi antara variabel independen (bebas) dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam hasil uji yang dilakukan, nilai sig pada masing-masing variabel diketahui besar dari 0,05 yaitu masing-masingnya, X1 nilainya 0,518, X2 yaitu 0,140, X3 yaitu 0,117 dan X4 yaitu 0,665. Dimana artinya menurut dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah tidak terjadi heteroskedastisitas pada masing-masing variabel.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi ini, maka diketahui nilai dari Durbin Watson adalah sebesar 2,052, atau disingkat dengan nilai D. sementara nilai DL dan nilai DU diperoleh dari tabel Durbin Watson diketahui sebesar DL 1,5922 dan DU 1,7582, nilai 4-DL adalah 2,4078 dan 4-DU adalah 2,2418, sehingga dari rincian tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu $DU < D < 4-DU$ yaitu $1,7582 < 2,052 < 2,2418$ artinya tidak terjadi korelasi pada penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari coefficients yang dilakukan dapat dikembangkan dengan menggunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$FCI = 0,146 - 0,001X_1 + 0,002X_2 + 0,026X_3 + 7,75X_4$$

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.146	.103		1.418	.160
	X1	-.001	.002	-.047	-.443	.659
	X2	.002	.001	.234	2.164	.033
	X3	.026	.021	.135	1.251	.214
	X4	7,75E-06	9.000	.047	.405	.686
a Dependent Variable: Y						

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dari model ini bias dilihat dalam Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Model	R	R Square		
1	.280 ^a	.078	.039	.149

a Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b Dependent Variable: Y

Diketahui bawah nilai adjusted R Square pada penelitian ini adalah 0,39, sehingga berdasarkan pengambilan keputusan terhadap Uji ini, jika nilai R^2 mendekati 0 maka pengaruh variabel X terhadap Y adalah kecil. artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen kurang baik.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini dilaksanakan untuk melihat apakah semua variabel Y memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel X. Hasil uji F disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6
Uji Signifikansi Simultan

ANOVA^a		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Model						
1	Regression	.180	4	.045	2.013	.099
	Residual	2.125	95	.022		
	Total	2.305	99			

a Dependent Variable: Y

b Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan diketahui bahwa nilai sig adalah sebesar 0,099 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga variabel X tidak berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel Y.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Y terhadap variabel X serta memperhatikan tingkat signifikansi secara parsial. Hasil uji-t dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.146	.103		1.418	.160
	X1	-.001	.002	-.047	-.443	.659
	X2	.002	.001	.234	2.164	.033
	X3	.026	.021	.135	1.251	.214
	X4	7,75E-06	9.000	.047	.405	.686

a Dependent Variable: Y

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai sig pada X2 menunjukkan nilai 0,033 yg artinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah. Namun, hasil uji nilai sig pada X1 adalah 0,659, artinya lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Pada penelitian ini X1 adalah jumlah penduduk, kesimpulannya adalah jumlah penduduk dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah pulau jawa. Begitu juga dengan variabel X3, dan X4 diketahui nilai masing adalah 0,709 dan 0,903 juga lebih besar dari 0,05 yang artinya hipotesis ini ditolak.

Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Pulau jawa

Kepadatan penduduk mempengaruhi layanan dan barang yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui sisi pasokan (Ritonga, 2019). Meningkatnya kepadatan penduduk (yaitu semakin dekat jarak antar rumah tangga) diyakini akan menurunkan biaya per unit barang dan jasa yang diproduksi oleh Pemerintah Daerah (Downing, 1973). Hyman (1990) juga berpendapat bahwa biaya rata-rata per unit analog dengan harga per unitnya. Biaya per unit yang lebih rendah menyebabkan Pemda memasok lebih banyak barang dan jasa kepada masyarakat. Keadaan ini menunjukkan Peningkatan pasokan barang dan jasa kepada masyarakat akan berdampak pada peningkatan solvabilitas tingkat layanan. Jika faktor-faktor lain tetap konstan, kondisi keuangan akan membaik.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dimana jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan. Melalui pengujian dari Program Spss didapatkan nilai sig adalah 0,895, artinya lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ditolak. Ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wang *et al.*, (2007) dan Santis (2020) Hasil ini memberi penjelasan bahwa seiring dengan bertambahnya penduduk pada suatu daerah tidak selalu membuat biaya pemerintah meningkat. Bahkan pada pemerintahan yang jumlah penduduknya lebih kecil bisa saja membuat kondisi keuangan daerah tersebut lebih baik. Ini dikarenakan setiap kenaikan pada Jumlah Penduduk tidak dibarengi dengan naiknya jumlah fasilitas publik. Maka dari itu, tidak terjadinya peningkatan pengeluaran Pemerintah daerah dari segi belanja. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga *et al.*, (2019), Casal & Gomez (2011), dan Bolivar *et al.*, (2016) yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan factor yang mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah

Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan Daerah Pulau Jawa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu bentuk penerimaan yang diperoleh suatu daerah melalui pengenaan pajak dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Pendapatan ini berkaitan erat dengan asal-usul sumber pendapatan yang dapat diperoleh oleh pemda. Jika Pemerintah daerah mampu mengandeng sumber keuangan yang cukup untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dapat menjalankan prinsip desentralisasi dengan efektif dan efisien (Nasution, 2010).

Pada peneliti ini yaitu pada pengujian PAD terhadap kondisi keuangan, dimana hipotesis yang dirumuskan adalah pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap kondisi keuangan menemukan hasil yang selaras, dimana hasil penelitian ini ditemukan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kondisi keuangan, artinya hipotesis diterima. Diketahui nilai sig pada uji-t yaitu 0,033 dimana lebih kecil dari nilai sig yang di tentukan yaitu 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cameli (2008) mengungkapkan bahwa pemasukan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Juga pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasasti (2013) dan Ritonga *et al.*, (2019) yang menguji PAD terhadap kondisi keuangan PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas investasi dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat berdampak positif pada kondisi keuangan pemerintah daerah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian ini didapat kesimpulan bahwa setiap kali terjadi kenaikan PAD, maka juga dibarengi dengan peningkatan program kerja daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang lebih baik sehingga dapat mendukung terjadinya kenaikan PAD ditahun seterusnya.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wang *et al* (2007) mengidentifikasi adanya pengaruh negatif antara basis pendapatan pemda dengan kondisi keuangan pemda. Pendapatan daerah berdampak pada kesehatan fiskal pemerintah daerah,

Efisiensi Keuangan Berpengaruh Terhadap kondisi Keuangan

Efisiensi keuangan mengacu pada praktik pengelolaan keuangan yang efisien yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Juga mengacu pada tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dan barang kepada masyarakat. Apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat mencapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang paling rendah maka proses kegiatan operasional tersebut dapat dikatakan efisien. Pammer (1990) berpendapat bahwa manajemen yang buruk akan menyebabkan tekanan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dari Ritonga *et al.* (2019) juga mengungkapkan bahwa efisiensi keuangan pemerintah daerah secara signifikan mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai sig 0,709 pada uji-t, dengan dasar pengambilan keputusan 0,05 pada tingkat signifikansi. Hasil ini menunjukkan nilai sig pada uji t lebih besar dari 0,05 yang artinya jika sig besar dari 0,05 hipotesis ditolak. Kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara efisiensi keuangan dengan kondisi keuangan di pulau jawa. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ritonga *et al.*, (2019) dan Monica (2023) yang menjelaskan bahwa efisiensi keuangan berpengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Dilihat dari koefisien masing-masing variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan, variabel efisiensi keuangan (yaitu 0,376) mempunyai pengaruh paling besar terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Kondisi ini berarti peningkatan efisiensi keuangan sebesar satu satuan akan menyebabkan perbaikan indeks kondisi keuangan sebesar 0,376 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap.

Hal Ini menunjukkan bahwa suatu daerah belum mampu mengelola anggaran belanja secara efektif. Hal ini bisa juga dipengaruhi oleh kecilnya anggaran yang disesuaikan sehingga tidak mampu menutupi biaya belanja yang harus dikeluarkan suatu daerah yang cukup besar sehingga terkesan belum mampu untuk mengelola anggaran seefisien mungkin

dengan menimalisir dan menekan angka pengeluaran Hasil penelitian peneliti memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efisiensi keuangan.

Harga Barang dan Jasa Berpengaruh Terhadap Kondisi Keuangan

Biaya barang dan jasa mencakup pengeluaran pemerintah untuk pembelian berbagai barang dan jasa yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan serta menyediakan layanan publik. Jumlah dan pola pengeluaran ini dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan pemerintah. harga barang dan jasa yang tinggi dapat menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan sebagian besar anggaran untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa. Jika biaya tidak terkendali atau tidak proporsional terhadap pendapatan, hal ini dapat mengganggu keseimbangan anggaran dan mempengaruhi kondisi keuangan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi baru pada penelitian selanjutnya dimana didapatkan hasil tidak adanya pengaruh biaya barang dan jasa terhadap kondisi keuangan. Berdasarkan hasil uji-t yang dilakukan dalam penelitian ini, didapatkan nilai sig yaitu sebesar 0.903, nilai ini lebih besar dari nilai dasar pengambilan keputusan uji-t yaitu 0.05. dengan ketentuan jika nilai sig lebih lebih besar dari 0,05 maka hipotes ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica (2023) yang menemukan hasil bahwa biaya barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga *et al.* (2019) posisi keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh biaya produk dan layanan. Ritonga *et al.* (2019) menyatakan bahwa harga barang dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah. Juga penelitian oleh Beck (1982) menemukan bahwa gaji pemerintah daerah dan belanja kesejahteraan yang terlalu tinggi merupakan kontributor tekanan fiskal.

Hal ini diartikan tidak ada pengaruh antar variabel harga barang dan jasa terhadap kondisi keuangan. Sehingga ketika upah minimum pemda meningkat, belum tentu juga biaya barang dan jasa juga terjadi peningkatan, hal ini dibuktikan dengan penelitian ini. hal ini bisa saja disebabkan karena setiap terjadi peningkatan pada Upah Minimum tidak diiringi dengan peningkatan transaksi biaya barang dan jasa sehingga Pendapatan Pemerintah daerah dalam bentuk pajak dan retribusi juga tidak meningkat, sehingga tidak akan mempengaruhi Kondisi Keuangan suatu daerah kearah yang lebih baik.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Jumlah penduduk melalui uji-t tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan pulau jawa tahun 2022. Pendapatan asli daerah melalui uji-t berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan pulau jawa tahun 2022. Efisiensi keuangan melalui uji-t tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan pulau jawa tahun 2022. Biaya barang dan jasa melalui uji-t tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan pulau jawa tahun 2022. Jumlah penduduk, efisiensi keuangan dan biaya barang dan jasa secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap kondisi keuangan tahun 2022.

Keterbatasan

Keterbatasan pada pada penelitian ini adalah sulitnya penulis dalam mendapatkan beberapa data pada beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota karena ada beberapa website yang membutuhkan perizinan, data laporan keuangan yang tidak lengkap, dan ada beberapa website yang bermasalah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti anatar lain sebagai berikut: Sebaiknya penelitian selanjutnya meneliti variabel lain yang memungkinkan hasil penelitian dengan hipotesis diterima. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel agar hasil penelitian lebih universalitas. Penelitian selanjutnya sebaiknya menentukan kriteria objek penelitian yaitu 2 tahun sebelumnya atau lebih agar data yang didapat lengkap dan tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cabaleiro Casal, R., & Buch Gómez, E. (2011). Impact of size and geographic location on the financial condition of Spanish municipalities. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 34, 22–39.
- Carmeli, A., & Gittell, J.H. (2009). High-quality relationships, psychological safety, and learning from failures in work organizations. *Journal of Organizational Behavior*, 30,709–729.
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(3), 396–418. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00238.x>
- Maher, C. S., & Nollenberger, K. (2009). Revisiting Kenneth Brown’s “10-Point Test.” *Government Finance Review*, October, 61–66.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467.
- Monica, M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Kesehatan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Owner*, 7(2), 1654–1668. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1414>
- Pammer, W. J. (1990). *Managing fiscal strain in major American cities: Understanding retrenchment in the public sector*. Greenwood Press.
- Prasasti, enjang Swastika. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. Artikel. Universitas PGRI. Yogyakarta
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a Measure of Local Government’S Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164. <https://doi.org/10.22146/jieb.6206>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2012). Assessing Financial Condition of Local Government in Indonesia : an Exploration. *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37–50.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 1–25. <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analysis Efficiency and Effectiveness Regional Financial Management in Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*, 23(4), 23–32.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of financial sustainability: An analysis of Italian local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187599>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wang, X., Dennis, L., & Tu, Y. sen jeff. (2007). Measuring financial condition: A Study of U.S. States. *Public Budgeting and Finance*, 27(2), 1–21. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5850.2007.00872.x>
- Zafra-Gómez, J. L., López-Hernández, A. M., & Hernández-Bastida, A. (2009). Developing a model to measure financial condition in local government: Evaluating service quality and minimizing the effects of the socioeconomic environment: An application to Spanish municipalities. *American Review of Public Administration*, 39(4), 425–449. <https://doi.org/10.1177/0275074008320710>